

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah adalah organisasi yang mencakup semua bidang lapisan masyarakat organisasi sektor publik. Sistem pengendalian intern (SPI) dirancang Pemerintah dengan Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai pedoman. Pengendalian intern menurut PP Nomor 60 tahun 2008 adalah suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien dengan cara pimpinan dan anggotanya memberikan keyakinan memadai atas tercapainya laporan keuangan yang andal, aset negara aman, peraturan perundang-undangan tetap diperhatikan. SPIP tersebut diadopsi dari *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions (COSO)*.

SPIP yang diturunkan dari kerangka COSO meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. COSO dan SPIP sama-sama memilih lingkungan pengendalian sebagai elemen terutama. SPI di bentuk untuk mengetahui kelemahan pengendalian atau pencegahan, yaitu lemahnya pengendalian pelaporan, lemahnya pendampingan pelaksanaan APBD, serta struktur pengendalian intern yang lemah. Namun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal dan beberapa lembaga pemantau telah mengkritisi lemahnya SPI di pemerintahan yang berpeluang pada terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD). KPMG tahun 2006 menyatakan

33% kasus terdeteksi karena adanya pengendalian intern. SPI harus layak agar tata kelola keuangan daerah berjalan dengan baik.

Tahun 2012 BPK mencatat ada 5.036 kasus SPI lemah. Ketentuan perundang-undangan yang dilanggar sejumlah 6.904 kasus dengan dana sebesar 7 triliun rupiah, dengan rincian 3.543 kasus sebesar 5,21 triliun rupiah adalah potensi kerugian dan 1,79 triliun rupiah sebanyak 3.361 kasus adalah penyelewengan administrasi yang mengakibatkan tidak efektif dan tidak efisien.

Tabel 1.1.
Kasus Kelemahan SPI Tahun 2012

No	Kelompok Temuan Kelemahan	2012	Keterangan
1	Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	1586 kasus	Provinsi = 105 kasus, Kabupaten = 1.184 kasus Kot = 297 kasus.
2	Sistem Pengendalian APBD	1935 kasus	Provinsi = 160 kasus, Kabupaten = 1.384 kasus, Kota = 391 kasus.
3	Struktur Pengendalian Internal	891	Provinsi = 70 kasus, Kabupaten = 646 kasus, Kota = 175 kasus.

Sumber: BPK RI 2013

Menurut BPK kasus kelemahan SPI sering terjadi karena kurangnya kecermatan penyajian laporan keuangan oleh pejabat pelaksana, kurangnya komitmen mengemban amanah, belum sepenuhnya mengerti ketentuan yang berlaku, pengawasan kegiatan sangat kurang, kurang koordinasi, sistem aplikasi lemah dan penyimpanan belum mencukupi). Penyebab lain yaitu kewajiban pajak migas yang tidak diawasi dengan baik.

Terdapat penelitian mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kelemahan pengendalian intern. Hartono dkk (2014), pertumbuhan dan size

mempengaruhi kelemahan pengendalian intern secara negatif, Kompleksitas mempengaruhi lemahnya pengendalian intern, serta PAD tidak mempengaruhi. Penelitian Nurwati (2015) menemukan hasil yang berbeda yaitu tidak ada pengaruh signifikan antara ukuran, pertumbuhan ekonomi, dan PAD terhadap kelemahan pengendalian intern, melainkan hanya jumlah penduduk dan belanja modal yang memiliki pengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern. Sedangkan pada penelitian Saputro (2015) belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap pengendalian intern. Hasil yang berbeda juga ditemukan oleh Fauza (2015) bahwa hanya variabel kompleksitas yang berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern. Oleh karena masih adanya kontradiksi pada hasil penelitian tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian intern.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hartono (2014) hanya menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, *size* pemerintah daerah, PAD dan Kompleksitas. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan variabel belanja modal, dimana variabel tersebut sudah diteliti oleh Nurwati (2015) dan Saputro (2015) namun masih memiliki hasil penelitian yang berbeda. Hubungan belanja modal dengan kelemahan pengendalian intern karena memudahkan korupsi, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kembali variabel tersebut. Kesimpulannya bahwa semakin besar anggaran belanja modal akan semakin memicu terjadinya kelemahan pengendalian intern. Penelitian ini juga menggunakan data periode 2013 dan 2014 sehingga tidak sama dengan penelitian sebelumnya.

Jawa Tengah adalah fokus wilayah yang diteliti, karena upaya sistem pengendalian intern masih lemah. BPK menemukan sistem pengendalian intern dan operasinya masih banyak terjadi kelemahan. Kelemahan sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ditemukan BPK adalah pencatatan dan penyajian saldo persediaan pada enam SKPD kurang memadai, pengendalian pencatatan aset tetap kurang memadai, pendapatan asli daerah pada beberapa SKPD terlambat disetor ke rekening kas daerah, pengendalian belanja barang dan jasa untuk dihibahkan pada tiga SKPD kurang memadai, pengendalian realisasi bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota yang diluncurkan pada APBD tahun berikutnya dan pertanggungjawaban atas bantuan keuangan kepada desa belum memadai.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah?
2. Bagaimana pengaruh *size* terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah?
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah?
4. Bagaimana pengaruh kompleksitas terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah?
5. Bagaimana belanja modal terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui hubungan pertumbuhan ekonomi dan kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.
2. Mengetahui hubungan *size* dan kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.
3. Mengetahui hubungan pendapatan asli daerah dan kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.
4. Mengetahui hubungan kompleksitas dan kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.
5. Mengetahui hubungan belanja modal dan kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Menjadi acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya dibidang pengendalian intern pemerintah serta meningkatkan ilmu pengendalian intern.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Informasi peningkatan mutu pengendalian intern pemerintah daerah guna meningkatkan kemajuan daerah dan bahan pertimbangan mengenai kinerja keuangan daerah. Dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah.